

ASPEK SOSIO-KULTURAL PENCEGAHAN TERORISME

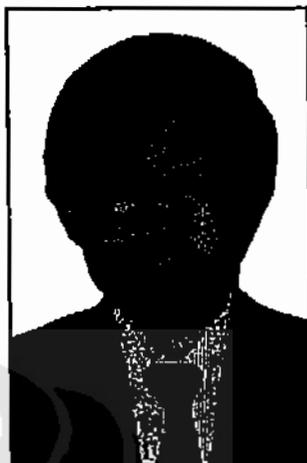


Thomas Sunaryo

The Terrorism in human behaviour and community perspective is apart of all social process progress in communities. That is the case, the preventive measure against the terrorism not only to arrest the suspects. Understanding the terrorism, not out off violent comprehension. This written made by a socio-cultural analysis in duty of make a fuss about terrorism with social conflict solve.

"Engkau tidak menciptakan perdamaian dengan berbicara kepada temanmu; engkau harus menciptakan perdamaian dengan musuhmu"

Nelson Mandela



A. Pendahuluan

Terorisme apabila dipahami dari perspektif tingkah laku manusia dan masyarakat, adalah sebagian dari keseluruhan proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan begitu penangkalan terorisme selayaknya tidak ditanggapi hanya dengan menangkap pelaku-pelakunya, mengadili dan menghukum seberat-beratnya.

Memahami terorisme, tidak lepas dari pemahaman kita mengenai kekerasan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kekerasan sangat membantu untuk menunjukkan bahwa:

- Terorisme dapat terjadi pada tingkat mikro, misalnya dalam keluarga dimana para wanita dan anak-anak mendapat perlakuan kejam, lokal, nasional dan internasional.
- Terorisme dalam banyak kasus hanya merupakan bagian kecil dari kekerasan-kekerasan, seperti pembunuhan, penganiayaan, perusakan yang terjadi. Intervensi pada satu dimensi saja akan menimbulkan

dampak reaksi terhadap dimensi lain. Pencegahan dan penanggulangan terorisme hanya akan efektif apabila disertai dengan pemberantasan berbagai bentuk kekerasan.

- Menyadarkan kita untuk mengidentifikasi orang-orang yang melakukan kekerasan, terorisme dan memperoleh keuntungan darinya, kadang dikenal sebagai "para wiraswatawan konflik" yang kepentingannya terpenuhi melalui kekerasan yang terus berlangsung.
- Sebagai jalan pembuka yang vital ke arah transformasi konflik, dalam hal konteks dan sikap terhadap suatu situasi.

Analisis sosio-kultural dapat membantu untuk membuat program-program penyelesaian konflik agar tidak menjadi kekerasan dan yang secara strategis dapat ditempatkan dalam jaringan kerja yang menghubungkan mereka secara vertikal menurut konteksnya dan diletakkan secara horisontal dengan konflik.

B. Transisi Pemerintahan Demokrasi

Dalam sejarah, ketika sistem pemerintahan demokrasi belum dikenal, suatu rezim yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawannya dengan cara diktatorial, intimidatif, kekerasan dan teror. Misalnya, kaum Yakobin yang memerintah di Perancis pada abad ke 17 yang dikenal dengan *terreur rouge*, rezim Hitler di Jerman pada sebelum perang Dunia II. Banyak pendapat bahwa Perang Dunia II tahun 1935-45 adalah adil karena dapat menghalangi teror dan kekerasan lebih kejam lagi yang dilakukan oleh Hitler dan Nazi Jerman. Setelah Perang Dunia ke II Rezim-rezim totaliter di Asia, Afrika dan Amerika Latin, yang sempat berkuasa untuk jangka waktu tertentu, memantapkan kekuasaannya dengan sistem (pemerintahan) teror. (Shadily, 1984: 3519).

Di Indonesia, pada masa Orde Baru, tindakan-tindakan ancaman, kekerasan, paksaan, pengusuran, teror, fitnah, vonis dan pembunuhan tanpa proses peradilan, penculikan, korupsi, diktator, memang menjadi bagian dari roda pemerintahan rezim Soeharto.

Gerakan ke arah demokratisasi juga melanda Asia. Cara negeri-negeri beralih ke demokrasi berbeda-beda, namun terdapat persoalan yang sama. Samuel P Huntington menjelaskan sejumlah masalah kontekstual

utama yang dihadapi negara-negara sedang mengalami transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang demokratis, yaitu: a) pemberontakan, b) konflik internal/komunal, c) tingkat kemiskinan yang ekstrim, d) ketimpangan sosial ekonomi yang mencolok, e) inflasi yang kronis, f) hutang luar negeri yang besar g) terorisme. Cara kerja demokrasi dan kegagalan pemerintah demokratis yang baru dalam memecahkan sikap acuh tak acuh, frustrasi, dan kekecewaan. Sulitnya masalah-masalah itu diatasi, kendala proses demokratis. Kelemahan-kelemahan para pemimpin politik, merupakan acara bahasan sehari-sehari. (Huntington 1991: 61).

C. Kekerasan Struktural

Masyarakat sulit membedakan antara, misalnya, pembunuhan dengan pistol, bom, dan pembunuhan karena kekurangan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Ini dapat disengaja, atau hanya karena lalai dalam memperhitungkan kebutuhan orang atau masyarakat lainnya. Ada banyak sistem dan struktur yang beroperasi dengan cara seperti ini. Bentuk-bentuk kekerasan yang kurang nyata tetapi juga dapat merusak dan bahkan mungkin lebih sulit diatasi.

Banyak orang berpendapat bahwa sistem keuangan internasional merupakan struktur kekerasan, di mana beberapa bangsa sengaja membuat bangsa lain menderita. Misalnya, sebagian besar lembaga internasional menganjurkan negara-negara seperti di Afrika, Asia dan Amerika Latin untuk meminjamkan dana dalam jumlah besar. Hutang-hutang dan persyaratan untuk membayar kembali hutang ini sekarang ditetapkan oleh IMF, yang telah mendesak banyak negara miskin untuk menata kembali kehidupan ekonomi mereka agar dapat membayar hutangnya daripada untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Efeknya, dari segi kematian dan runtuhnya kehidupan, sering sama seriusnya dengan akibat yang ditimbulkan oleh peperangan.

Situasi ini menjadi lebih rumit karena para pemimpin ekonomi dan politik di negara-negara utara dan selatan terbukti berkonspirasi dalam menciptakan hutang-hutang ini, sehingga mereka memperoleh keuntungan secara finansial sementara sebagian besar masyarakat menderita. Peperangan sendiri sering merupakan akibat dari berbagai sistem yang disengaja oleh pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu kehancuran, misalnya, pabrik-pabrik senjata dan perdaganganannya.

Di mana saja ada sistem yang mendominasi kelompok, masyarakat, dan negara satu dengan lainnya sampai akhirnya mengancam kehidupan dan mata pencaharian, akan **“menyebabkan kekerasan struktural atau kekerasan melembaga”**.

Contoh lain kekerasan struktural diantaranya adalah, diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, penyangkalan hak dan kemerdekaan, disamping globalisasi ekonomi dan pemisahan (misalnya, kebijakan partheid). Dalam kerangka pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Menarik. ucapan Nelson Mandela dalam kata pembukaan pembelaannya pada pengadilan kasus penghianatan Rivonia, antara lain sebagai berikut: “...Sejauh ini beberapa hal yang disampaikan di pengadilan benar dan beberapa diantaranya tidak benar. Namun demikian saya tidak menyangkal bahwa saya merencanakan sabotase. Saya tidak merencanakannya secara sembrono, juga bukan karena saya menyukai kekerasan. Saya merencanakannya dengan penuh ketenangan dan berdasarkan penilaian yang cermat terhadap rakyat saya oleh-orang-orang kulit putih...Saya mengaku bahwa saya adalah salah satu dari orang-orang yang membentuk *Umkhonto we Sizwe*, dan kemudian saya berperan sangat penting didalamnya hingga saya ditangkap pada bulan Agustus 1962...Saya dan kawan-kawan yang memulai organisasi tersebut, melakukannya karena dua alasan. Pertama kami yakin bahwa, sebagian akibat kebijakan pemerintah, kekerasan oleh rakyat Afrika menjadi tidak terhindarkan, dan akan muncul terorisme yang dapat membuahkan penyiksaan dan permusuhan yang intensif antara ras yang berbeda di negara ini, yang bahkan tidak dihasilkan oleh peperangan kecuali jika kepemimpinan yang bertanggung jawab diberikan untuk menyalurkan dan mengendalikan perasaan rakyat kami. Kedua, kami merasa bahwa tanpa kekerasan tidak akan ada jalan terbuka bagi masyarakat Afrika untuk berhasil dalam perjuangan mereka melawan supremasi hukum kaum kulit putih. Semua cara untuk mengekspresikan oposisi yang sesuai dengan hukum terhadap prinsip ini telah tertutup oleh undang-undang, dan kami harus menerima kami lebih rendah, atau menentang Pemerintah. Kami memilih untuk menentang hukum. Awalnya kami melanggar hukum tetapi dengan cara menghindari terjadinya kekerasan; tetapi ketika hal ini dinilai melawan undang-undang, dan kemudian Pemerintah menggunakan

kekerasan untuk menghancurkan perlawanan terhadap kebijakannya, maka sejak itulah kami memutuskan untuk menjawab kekerasan dengan kekerasan. (Fisher, 2000: 38).

Nelson Mandela juga terkenal dengan ucapannya: "Engkau tidak menciptakan perdamaian dengan berbicara kepada temanmu; engkau harus menciptakan perdamaian dengan musuhmu"

D. Penanganan Konflik

Didalam masyarakat terdapat berbagai konflik. Konflik selain terjadi karena perbedaan "alami, ada perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi, seperti: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut jender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu, dan sebagainya. Dari tingkat mikro, antarpribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara, semua bentuk hubungan manusia - sosial, ekonomi dan kekuasaan - mengalami pertumbuhan, perubahan, dan konflik.

Konflik terjadi ketika tujuan dari hubungan-hubungan itu tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, sering bersifat kreatif dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.

Simon Fisher, secara garis besar, merumuskan beberapa teori yang dapat digunakan untuk memahami sebab-sebab terjadinya konflik, yang masing-masing penanganannya berbeda, yaitu:

- Teori hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
- Teori negosiasi prinsip, beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
- Teori kebutuhan manusia, yang berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia - fisik, mental, dan sosial - yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.

- Teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.
- Teori kesalahpahaman antarbudaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.
- Teori transformasi konflik, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Konflik berubah menjadi kekerasan jika: (a) saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai, (b) suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi, (c) banyak ketidakstabilan, ketidakadilan dalam masyarakat yang lebih luas.

Dalam hubungan ini, Fisher, menunjukkan pula bahwa agama dan budaya sering merupakan elemen pokok dalam pergerakan politik. Agama yang dipeluk oleh etnis minoritas menjadi bagian dari basis ideologi untuk bertindak melawan wakil dari budaya yang dominan – yang dianggap oleh kaum minoritas mempunyai tujuan untuk menekan atau menghilangkan budaya minoritasnya. Dalam banyak kasus pemeluk religius tidak banyak bedanya dalam tingkah laku dari budayanya sendiri. Dalam banyak kasus pemeluk religius tidak banyak bedanya dalam tingkah laku dari budayanya sendiri. Misalnya gereja-gereja di Rwanda sebelum dan sampai tahun 1994 menyampaikan kotbah mengenai perdamaian dan rekonsiliasi, dan bahkan mengelola program-program untuk mempromosikan tujuan ini, tetapi para pendetanya, biarawati dan pengunjung gereja bisa sama-sama berpartisipasi aktif dalam kegiatan genosida (pemusnahan suatu bangsa atau ras). (Fisher, 2002: 24-25).

Di Indonesia mungkin dalam setiap kebudayaan daerah terdapat unsur-unsur yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam keadaan tertentu. Adanya unsur-unsur demikian, gejala penggunaan kekerasan, teror, sebaiknya ditanggapi sebagai gejala yang normal.

Prasangka primordial yang tercermin dalam rasa kebencian, ketakutan dan ketidakpercayaan merupakan perasaan-perasaan yang membuat kita menggolongkan masyarakat ke dalam kelompok inferior, ras, jender, agama, etnis, kemampuan fisik, ideologi politik, atau orientasi seksual. Perasaan-perasaan ini dapat membuat kelompok

tertentu dalam masyarakat menjadi tidak toleran terhadap siapa saja yang berbeda dalam dalam hal yang disebutkan diatas. Selanjutnya, dengan adanya kesalahan-pahaman, mudah sekali bagi mereka untuk menganggap anggota kelompok lain sebagai lebih rendah daripada dirinya, sehingga secara langsung atau tidak mereka bertindak tidak manusiawi terhadap orang lain dalam kelompok yang berbeda. (Sunaryo: 1999).

Dengan sendirinya semakin terintegrasi seseorang dalam pengelompokan-pengelompokan sosial yang berpedoman pada perangkat nilai yang membenarkan penggunaan tindakan kekerasan, semakin besar pula orang ini akan melakukan kekerasan. Ideologi-ideologi politik terutama yang bersifat radikal, baik dalam usaha mengubah maupun mempertahankan keadaan sebagaimana adanya, biasanya tidak luput dari unsur-unsur yang penggunaan kekerasan.

D. Langkah Strategi Pencegahan

Analisis sosiokultural seperti yang telah dikemukakan diatas dapat membantu untuk menyusun langkah-langkah strategis penangkalan terorisme - yang diyakini - hadir ditengah berbagai peristiwa kekerasan di tanah air, antara lain:

Pertama, banyak persoalan global dan regional akan memilih jalan damai biasa, namun diplomasi selalu memerlukan dukungan dan kesiapsiagaan angkatan perang. "Perang adalah sebetulnya diplomasi juga, hanya dalam bentuk yang lain". Demikian kata Clausewitz, seorang ahli perang klasik. (Kennedy, 1991:17). Maka bila terorisme membuat suatu guncangan *status quo* regional di kawasan Asia-Pasifik, Amerika Serikat (dan sekutunya) dengan dilatar belakangi kekuatan Armada ke VII serta pasukan marinirnya, pasti akan berintervensi langsung.

Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Disinilah letak pentingnya TNI untuk memperkuat diri dalam kerangka kerjasama pertahanan ASEAN dan Polri dalam rangka kerjasama dengan interpol untuk mengatasi terorisme, terutama yang berskala internasional.

Kedua, laskar-laskar sipil semi militer apalagi yang menggunakan atribut agama selayaknya membubarkan diri. Label agama seyogyanya digunakan secara bijaksana untuk mengurangi ketegangan yang tidak perlu antarumat beragama. Sebab semua agama pada dasarnya untuk membangun akhlak dan budi pekerti tinggi. Dalam hal peran masyarakat sipil (*civil society*), satu hal yang terpenting adalah kepemimpinannya.

Banyak kelompok dan masyarakat yang terjebak dalam konflik karena nasib mereka berada di tangan orang-orang yang korup atau tidak kompeten – dan mereka membiarkan hal ini berlangsung terus.

Dalam masyarakat yang dipimpin oleh seorang diktator, lembaga-lembaga sosial seperti masjid, gereja, sekolah, proyek-proyek pembangunan dan lain-lain sebagainya cenderung mengembangkan gaya kepemimpinan yang sama, yaitu otoriter. Akibatnya banyak diktator kecil muncul diseluruh spektrum sosial. Dalam situasi seperti ini, berbagai masalah besar harus dihadapi oleh masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya.

Ketiga, faktor ekonomi sangat fundamental bagi ketahanan nasional suatu bangsa. Perkembangan ekonomi memungkinkan terciptanya demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi, elite politik minimal harus percaya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan kejelekan minimal bagi masyarakat dan bagi mereka sendiri. Maka elite politik harus memiliki keterampilan untuk mewujudkan frustasi menuju demokrasi dengan menghadapi kelompok-kelompok radikal dan kelompok konservatif yang pasti akan tetap ada.

Keempat, pendidikan perdamaian dan keadilan. Media massa gencar sekali menyebarkan informasi tentang perang, terorisme dan kriminalitas, sehingga masyarakat menjadi tuli akan kenyataan bahwa kemungkinan kondisi lainnya tetap ada. Pendidikan untuk mendukung perdamaian (demokrasi, hak asasi manusia dan pluralisme) adalah pendidikan yang cocok untuk anak-anak dan orang dewasa dan dapat dilakukan secara informal dan formal dengan menyisipkannya kedalam pendidikan agama, sejarah, geografi, sastra, iptek dan lain-lain.

Kelima, pemerintah yang baik. Peningkatan kualitas pemerintah yang baik terletak pada penggunaan kekuasaan secara sah. Kombinasi antara berbagai lembaga, hukum, dan perundangan, prosedur serta norma yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan memperjuangkan kepentingannya melalui cara-cara yang dapat diprediksi dan adil merupakan landasan pemerintah yang baik. Administrasi yang efisien terhadap sumber daya milik publik merupakan unsur tambahan yang penting.

Keenam, salah satu masalah yang muncul adalah, trauma dan kepedihan yang dialami pada masa lampau, sering diremehkan. Pengalaman kolektif tentang kepedihan, kehilangan, kesakitan, dan mungkin kekerasan; ini sering menjadi penghalang dalam menangani konflik. Jika luka-luka ini tidak diakui dan diatasi, efek paling sederhana

adalah terhalangnya kreativitas untuk berpikir, untuk menjalin hubungan dan bertindak. Lebih drastis lagi akibat luka-luka ini dapat muncul dalam bentuk perilaku yang jahat terhadap masyarakat dan kelompok-kelompok lain dan bisa dijadikan legitimasi untuk memusnahkan lawan. Jika suatu kelompok atau negara merasa bahwa mereka sudah diperlakukan secara tidak adil atau menjadi korban kejahatan masa lalu, mereka akan cenderung teringat pada ketidakadilan itu, mereka takut hal yang sama akan berulang, dan mungkin juga mereka akan aktif mencari kesempatan untuk melakukan balas dendam terhadap pihak yang dianggap musuh mereka.

Adanya berbagai kendala tersebut, dan mata rantai yang menghubungkannya dari pribadi sampai ketinggian nasional, menciptakan keadaan di mana orang terpaksa menggunakan kekerasan. Slogan dari gerakan perempuan yang mengatakan: 'masalah pribadi adalah masalah politik' berlaku disini. Ketika masyarakat tersisih atau tertindas, mereka mengalami berbagai konflik pribadi sehingga mereka melakukan tindakan politis. Tekanan terhadap konflik juga merupakan lahan subur yang dapat dieksploitasi oleh para politikus, tentara dan pemeras, yang mungkin akan merekrut mereka yang menderita dan tertindas untuk membantu mendapatkan kekuasaan dan pengaruh mereka sendiri di tingkat nasional, dengan menggunakan kekerasan secara paksa. Budaya kekerasan muncul dan berkembang, karena konflik selalu ditangani melalui kekerasan. (Sunaryo:2002).

Penggunaan kekerasan memperbesar kekuasaan para spesialis kekerasan baik dalam pemerintahan maupun di pihak oposisi. Pemerintah yang diciptakan dengan moderasi dan kompromi dikuasai oleh moderasi dan kompromi. Pemerintah yang dilahirkan dengan kekerasan dikuasai oleh kekerasan.

Daftar Pustaka

- Clausewitz, Carl Von, "On War" dalam Kennedy, Paul, Ed. *Grand Strategies in War and Peace*, New Haven and London: Yale University Press, C 1991.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru- Van Hoeve. 1984
- Fisher. Simon; Dekha Ibrahim Abdi, dan kawan-kawan, *Working with Conflict: Skills & Strategies for Action*, New York: Zed Books Ltd. 2000
- Huntington, Samuel P, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman and London: University of Oklahoma Press, 1991.
- Sunaryo, Thomas, "Primordialisme, Kekerasan, Dan Integrasi Nasional", dalam *Demokrasi dan Otonomi: Opini masyarakat reformasi kehidupan berbangsa*, Jakarta: Kompas, 1999.
- Sunaryo. Thomas, "Terorisme, Kekerasan, dan Wajah Kita", *Kompas*, 5 Nopember 2002.

